

MENCARI MODEL TATA KELOLA
LINTAS PERBATASAN BERBASIS
CONNECTIVITY AND COMMON PROSPERITY:
Studi Kasus Perbatasan Darat Indonesia – Malaysia

Editor: Endi Haryono, Abdul Rahim Annuar, Erwin Endaryanta



JIPP
JURUSAN POLITIK &
PEMERINTAHAN
FISIPOL UGM



UUM COLGIS
College of Law, Government and International Studies

Daftar Isi

Daftar Isi **4**

Kata Pengantar dan Ucapan Terimakasih **6**

Penguatan Human Security Sebagai
Strategi Pengelolaan Perbatasan

Indonesia – Malaysia **10**

Yohanes Sanak

Menentukan Tapal Batas Budaya Indonesia - Malaysia **16**

Yamin

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Sebagai Ruang Bersama **32**

Wahyuni Kartikasari

Perdagangan Perbatasan Sarawak - Kalimantan Barat: Tebedu - Entikong **48**

Abdul Rahim Anuar

Perkembangan Kerjasama Sosek Malindo di Wilayah Kalimantan Barat dan

Serawak: Pencapaian dan Hambatan **56**

Nira Hariyatie Heartani & Abubakar Eby Hara

In Search for Integrated Borderland Security Policy: Case Study on the Border-
land Security Approach of Indonesia- Malaysia West Kalimantan **74**

Erwin Endaryanta & Azifah Retno Astrina

Indonesia-Malaysia Land Border Securitization: A Myth of Sisiphus? **82**

Alban Sciascia

Rezim Persahabatan Asean Dalam Tata Kelola Lintas Perbatasan Darat Indonesia –
Malaysia Berbasis Connectivity **94**

Saptopo B Ilkodar

Pengembangan Sistem Keamanan Berbasis Pemberdayaan Wilayah Perbatasan
Darat RI - Malaysia **108**

Armaidly Armawi

Problem Border Diplomacy Dalam Tata Kelola
Perbatasan Indonesia-Malaysia **116**

Iva Rachmawati dan Fauzan

Umpan di Perbatasan: Studi Kasus Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia
Melalui Perbatasan Kalimantan Barat - Serawak **128**

Prof. Dr. Tulus Warsito

Tata Kelola Wilayah Darat Perbatasan Indonesia-Malaysia yang
Didukung Infrastruktur Data Spasial

Untuk Menuju Connectivity dan Common Prosperity **140**

Sumaryo & Heri Sutanta

Isu Keamanan Maritim di Wilayah Perbatasan Kepulauan Riau (Perbatasan Maritim
Indonesia – Malaysia, Singapura, Vietnam) **158**

Fauzan & Suryo Wibisono

Pembangunan Daerah Perbatasan Sebagai Identitas Kemajuan Negara **173**

Panji Prasetya

Perbatasan Malaysia-Indonesia Dalam Reportase Koran Kompas 2008-2012 **184**

Endi Haryono dan Ratnawati Yuni Suryandari

Mewujudkan Common Prosperity Dalam Ketimpangan Ekonomi Indonesia –
Malaysia: Konteks Asean Connectivity **197**

AT. Erik Triadi, Abdullah Achmad Madani, Dian Iskandar , Dwi Setyowati, Reni
Shintasari, Riki Nopiansah, dan Novi Winarti.

Kata Pengantar dan
Ucapan Terimakasih

Kata Pengantar dan Ucapan Terimakasih

PERBATASAN adalah entitas politik ruang yang menjadi garis peneguh dari kedaulatan sebuah negara-bangsa. Ia menjadi lokus koneksitas dan diskonektivitas antar negara-bangsa yang sekaligus penanda dari legitimasi negara bangsa.

Kendati posisinya yang strategis, kerap kali negara justru gagal menaruh perhatian serius terhadap zona atau daerah perbatasan ini. Absensi negara dalam tata kelola perbatasan beririsan kuat dengan regim politik yang beroperasi untuk menentukan wajah pembangunan kawasan perbatasan maupun cara dalam menentukan garis batas antar negara. Regim yang dimaksud adalah tata nilai, norma, kepercayaan maupun corak pelebagaan dari operasionalisasi relasi politik diperbatasan. Rejim politik formal kenegaraan maupun informal yang melibatkan jejaring relasi sosial-politik dari kehidupan masyarakat di perbatasan. Kecenderungan umum menunjukkan bahwa rejim politik informal di tengah masyarakat yang terbangun secara historis yang mendahului rejim politik formal negara-bangsa menjadi komplikasi legitimasi dari entitas politik ruang negara-bangsa tersebut.

Di era globalisasi sekarang ini tingkat kerawanan di kawasan perbatasan semakin terasa, utamanya ketika intensitas mobilitas barang dan jasa yang melintasi kawasan perbatasan, baik legal maupun illegal semakin tinggi. Tatanan politik ekonomi global menghendaki agar setiap negara semakin membuka diri terhadap hal itu melalui berbagai bentuk kebijakan yang bernafaskan liberalisasi dan penghapusan batas negara yang menghambat perdagangan antar-bangsa. Indonesia dan Malaysia, dan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations/ASEAN*), merespon dan mengikuti kecenderungan liberalisasi global ini dengan mempercepat regionalisasi. Para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk mendorong kesepahaman dan merancang sebuah masyarakat ASEAN yang satu pada tahun 2015. Upaya ini hendak dicapai dengan *roadmap ASEAN Connectivity*, yang antara lain menekankan pelunakan daerah-daerah perbatasan dan pengelolaan perbatasan yang dinamis dan membawa kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Hanya dengan konektivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka daerah perbatasan akan menjadi penyangga keamanan nasional negara-negara secara efektif, dan sekaligus berkontribusi terhadap kemakmuran bersama. Di banyak daerah perbatasan di negara berkembang, termasuk Indonesia, perhatian pemerintah dan kehadiran negara kurang memadai. Kawasan perbatasan menjadi perhatian nasional hanya ketika ada sengketa perbatasan antar negara. Dengan sejumlah pengecualian, penanganan masalah perbatasan di Indonesia, misalnya, masih dilangsungkan secara reaktif. Setelah lama tidak terurus, daerah perbatasan baru mendapatkan perhatian publik dalam bentuk wacana pada tahun 1999, menyusul reformasi politik yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Kendati demikian, daerah perbatasan baru mendapatkan perhatian dalam konteks kebijakan pada tahun 2004 dan kemudian menjadi prioritas kebijakan pemerintah tahun 2006. Selanjutnya, tahun 2010, pemerintah membentuk sebuah badan pengelola perbatasan untuk mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan. Karenanya, kawasan perbatasan Indonesia dengan negara lain sebagian besar merupakan wilayah yang bisa dikategorikan sebagai wilayah tertinggal atau terisolasi atau malah keduanya.

Tatanan dunia baru yang didorong oleh globalisasi telah mentransformasikan perbatasan menjadi kawasan yang menghubungkan negara-negara dan tumpuan bagi konektivitas regional. Perbatasan negara tidak lagi harus dijaga dan dikelola dengan keras yang sehingga membatasi pergerakan warga dari negara-negara yang berbeda. Perbatasan, terutama di negara-negara demokratis dan maju, telah dilunakkan menjadi kawasan yang menghubungkan dan mendorong transaksi lintas batas, sehingga kedua negara bisa menguatkan *best practices* dalam pengelolaan perbatasan untuk maksimalisasi kesejahteraan dan keamanan. Pendekatan kesejahteraan menjadi konsekuensi logis dari bergesernya paradigma pengembangan kawasan perbatasan dari *inward looking* menjadi *outward looking*.

Pendekatan kesejahteraan secara spasial akan direfleksikan melalui pengembangan kota-kota utama di kawasan perbatasan atau Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang akan dijadikan sebagai motor pertumbuhan bagi wilayah-wilayah di sekitar perbatasan negara. Konsep pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan mengacu pada komitmen untuk menjadikan perbatasan sebagai pusat pengembangan ekonomi regional dan nasional.

Di tingkat ASEAN, hadirnya globalisasi dan kecenderungan pelunakan perbatasan negara direspon oleh para pemimpin negara-negara di kawasan ini dengan kesepakatan dan komitmen politik untuk memaknai garis perbatasan dan kawasan perbatasan sebagai penghubung konektivitas untuk kemakmuran bersama.

Komitmen politik 10 negara ASEAN dicapai pada pertemuan ke 17 tanggal 24 October 2009 di Cha-am Hua Hin, Thailand, dituangkan dalam statuta ASEAN Connectivity yang didefinisikan dalam keterjalinan fisik, kelembagaan dan masyarakat. Konektivitas ASEAN ini menjadi bagian penting dari roadmap ASEAN 2015. Indonesia dan Malaysia, sebagai pendiri dan poros penting ASEAN, harus lebih maju dan serius dalam merespon dampak globalisasi terhadap pelunakan perbatasan untuk kemakmuran bersama.

Indonesia dan Malaysia juga sudah saatnya mengubah perbatasan dua negara yang panjang bukan sebagai garis dalam peta yang memisahkan dan penuh konflik, melainkan menjadikannya wilayah aman dan makmur yang mengeratkan dan menyatukan penduduknya, meskipun dalam kewarganegaraan yang berbeda. Selain berbagi garis perbatasan yang panjang, yakni lebih kurang 2004 kilometer, Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun yang juga berbagi kesamaan sosio-budaya. Pertukaran ekonomi kedua negara juga terus tumbuh pesat. Investasi Malaysia di Indonesia tahun 2005-tahun 2009 mencapai 285 proyek investasi senilai US\$ 1.2 miliar, dan investasi Indonesia di Malaysia berjumlah US\$ 534 juta. Volume perdagangan kedua Negara yang mencapai nilai US\$ 11,4 miliar di tahun 2009.

Lebih dari 30 akademisi, praktisi, dan pengamat perbatasan Malaysia-Indonesia selama dua hari (Jumat, 9/11/2012) dan Sabtu (10/11/2012), mempresentasikan makalah dan berdiskusi dalam Lokakarya Pencarian Model Pengelolaan Lintas Perbatasan Malaysia-Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Utara Malaysia (UUM) bekerja sama dengan Badan

Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia. Ada tiga rangkaian kegiatan dalam forum ini: 1. Seminar tentang perbatasan Indonesia-Malaysia yang menghadirkan pembicara dari BNPP, Direktorat ASEAN pada Kementerian Luar Negeri, UGM, dan UUM; 2. Lokakarya mendiskusikan makalah yang disiapkan oleh para peserta; dan 3. *Roundtable discussion* untuk merumuskan agenda- agenda kegiatan bersama (riset dan lokakarya) sebagai tindak lanjut lokakarya ini.

Lokakarya ini merupakan rintisan awal kerjasama akademik Malaysia-Indonesia untuk mencari model tata kelola perbatasan berbasis konektivitas dan kesejahteraan bersama. Karenanya, lokakarya mengidentifikasi isu, problem, dan peluang bagi pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus menggali secara bersama kerangka kerjasama sosio-politik, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan. Lokakarya

mengambil topik tata kelola lintas perbatasan pada tiga isu, yakni: keamanan, pertumbuhan dan kerjasama ekonomi, dan pengembangan sosial-budaya. Lokakarya ini, disebut juga The 1st Malindo Border Conference, akan ditindaklanjuti dengan lokakarya yang sama di masa mendatang yang melibatkan lebih banyak akademisi, praktisi, dan universitas. Kegiatan lokakarya ini sendiri berangkat dari persepsi positif bahwa pengelolaan perbatasan yang berhasil dalam perspektif konektivitas dan kemakmuran bersama akan menambah ikatan yang mengokohkan hubungan antar negara. Tulisan-tulisan yang dihimpun dalam buku ini adalah tulisan-tulisan terpilih dari kegiatan lokakarya tersebut.

SELANJUTNYA kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan lokakarya dan penerbitan tulisan (paper) terpilih dari lokakarya tersebut. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Rektor UGM Prof. Dr. Pratikno, Rektor (Vice Chancellor) UUM Prof. Dato Dr. Mustafa Ishak, mantan Sekretaris BNPP Bapak Drs. Sutrisno, Sekretaris BNPP Bapak Drs. Triyono Budi Sasongko, M.Si, Deputi Lintas Perbatasan BNPP Brigjen (purn.) TH. Soesetyo, dan Asisten Deputi Lintas Perbatasan Bapak Dr. Soni Sumarsono, M.Dev. Staf pengajar COLGIS (UUM) dan FISIPOL (UGM) atas dukungan akademik berharga terhadap prakarsa pengembangan kajian perbatasan Malaysia-Indonesia, Prof. Dr. Mohtar Mas'ood, Drs. Cornelis Lay, MA, Prof. Dr. Kamarulnizam Abdullah. Prof, Dr. Alida John Abdullah, dan Prof Madya Dr. Samihah Khalil. Dekan FISIPOL Dr. Erwan Agus, Wakil Dekan Urusan Kerjasama Dr. Najib Azcka, para wakil dekan dan rekan-rekan dosen FISIPOL. Pengurus dan seluruh staf Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP): Prof. Dr. Purwo Santoso, Nur Azizah, SIP, MA, Miftah Adhi Nusranto, SIP, MA dan rekan-rekan dosen yang lain. Dekan dan para pengurus COLGIS UUM. Rekan- rekan dari berbagai universitas dan lembaga yang telah mengajukan makalah dan terlibat dalam lokakarya. Mas Rangga dan rekan-rekan desk studi perbatasan di Polgov Research Centre: Ina, Rafif, Erik, dan seluruh staf pada Polgov dan banyak nama lain yang terlalu banyak untuk disebutkan semuanya.

Penyunting

Endi Haryono
Abdul Rahim Annuar
Erwin Endaryanta